

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN RASIO
EFEKTIVITAS DAN RASIO EFISIENSI PENDAPATAN ASLI
DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

Nama : NURUL ANISA
Npm : 1305170477
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

NURUL ANISA. NPM. 1305170477. Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Langkat, Medan, 2017. Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang dilihat dari Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Hasil penelitian ini berdasarkan atas analisis Laporan Realisasi APBD Kabupaten Langkat menunjukkan Rasio Efektivitas Kabupaten Langkat tahun 2011 2012 2013 tidak Efektif karena terdapat penurunan realisasi anggaran pendapatan asli daerah. Disebabkan karena sumber penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah sangat kurang dari yang dianggarkan sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis data, Rasio Efisiensi Kabupaten Langkat sudah cukup Efisien namun penurunan Rasio Efisiensi masih terjadi yang disebabkan oleh peningkatan pendapatan daerah yang diikuti oleh peningkatan belanja daerah.

Kata Kunci : Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi PAD, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr,Wb

Alhamdulillah wasyukurilah segala puji bagi ALLAH SWT penulis panjatkan. Atas semua limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya Shalawat serta Salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat-Nya yang telah menjadi jalan bagi umat-Nya dalam menempuh keselamatan dan kebahagiaan dengan ilmu pengetahuan yang benar sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan yaitu Skripsi di Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Langkat”** dengan lancar.

Skripsi ini disusun dengan penuh itikad, semangat serta keikhlasan untuk memberikan pengetahuan serta pengalaman terhadap pengembangan kajian ilmu Ekonomi, khususnya Akuntansi. Penulis menyadari bahwa karya ini hanyalah sebagian kecil dari ribuan karya orang lain, namun penulis berharap agar karya ini tetap memberikan sedikit kontribusi untuk penelitian selanjutnya.

Disamping itu, penulis juga tidak dapat memungkiri bantuan dari pihak lain penyusunan skripsi sangat berperan. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan materil maupun ilmu kepada :

1. **Ayahanda Kamiran dan Ibunda Erni Panjaitan** Teristimewa yang telah memberikan kasih sayang dengan mengasuh, membimbing serta tiada henti-

hentinya mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

2. **Kakaknda Noni Novianda S.Pd.I**, Tercinta yang telah menyayangi, memberi semangat dan motivasi serta doa yang telah diberikan kepada penulis.
3. **Bapak Dr. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. **Bapak H. Januri, S.E, MM, M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. **Ibu Fitriani Saragih. S.E, M.Si**, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. **Ibu Zulia Hanum SE, M.Si**, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. **Bapak Sukma Lesmana, SE, M.Si**, selaku pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk penulis dan memberikan masukan serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
8. **Bapak Drs. H. Mulyono M.Si**, selaku Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Langkat yang telah membantu dalam penelitian ini serta yang telah memberikan izin kepada peneliti melakukan riset.
9. **Bapak Hery Susanto, SE**, selaku Kabid Pembukuan dan Verifikasi BPKAD Kabupaten Langkat yang telah memberikan peneliti data Laporan Realisasi APBD Kab. Langkat demi kelancaran proses penelitian ini.
10. **Bapak Syamsul Bahri** yang telah membantu proses izin melakukan riset di BPKAD Kabupaten Langkat.

11. **Seluruh Staff Pengajar** di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terutama biro Akuntansi terima kasih atas semua bantuan dan semua informasinya selama ini kepada penulis.
12. Kepada teman-teman saya **Muhammad Taufik Hidayat, Sri Devi Handayani, Khairunita, Afrida Salviyani, Erni Casmita Ritonga, Tyara Anzas Sari, Nurul Amalia, Wahyu Irawan, Fuad Fadillah, Muhammad Khuzafah Nst** yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kekasih penulis **Aziz Kesuma** yang telah bersabar, memberi semangat, memberikan doa dan memberikan motivasi kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. **Seluruh teman-teman Akuntansi A Siang** yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat berguna untuk penyempurnaan karya ini. Akhir kata penulis harapkan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan khususnya bagi penulis sendiri.

Billahi fii Sabililhaq fastabiqul Khairat

Wassalamu'alaikum Wr,Wb

Medan, Oktober 2017
Penulis

NURUL ANISA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. URAIAN TEORI	10
1.1 Kinerja Keuangan Daerah.....	10
1.2 Pengukuran Kinerja Pemerintah	16
1.2.1 Definisi Pengukuran Kinerja.....	16
1.2.2 Elemen Pokok Pengukuran Kinerja	17
1.2.3 Tujuan Pengukuran Kinerja	18
1.2.4 Manfaat Pengukuran Kinerja	18
1.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	19
1.3.1 Definisi Laporan Keuangan	19
1.3.2 Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	19
1.4 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah	20
1.5 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.....	21

B. Kerangka Berpikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan Penelitian	27
B. Definisi Oprasional Variabel	27
C. Tempat dan Waktu Penelitian	28
D. Jenis dan Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Hasil Penelitian	32
1.1 Gambaran Umum Kabupaten Langkat	32
1.2 Visi dan Misi BPKAD Kabupaten Langkat	33
B. Deskripsi Data	35
1.1 Rasio Efektivitas	35
1.2 Rasio Efisiensi	36
C. Pembahasan	37
1.1 Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Langkat	37
1.2 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat ..	39
BAB V PENUTUP	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga pemerintahan merupakan organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Sebagai organisasi nirbala, lembaga pemerintahan mempunyai tujuan untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut dimasa yang akan datang. Sebagai organisasi yang tidak berorientasi pada keuntungan/laba, pemerintah daerah memiliki tujuan utama yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, peningkatan keamanan dan kenyamanan, mutu pendidikan, mutu kesehatan, penegakan hukum, transportasi publik, dan penyediaan barang kebutuhan publik.

Sehubungan dengan banyaknya perubahan dibidang ekonomi, sosial dan politik dalam era reformasi ini, sangat berdampak pada percepatan perubahan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan transparansi keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, demokratis dalam pengambilan keputusan, pemberi pelayanan oleh pemerintah yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah memberlakukan Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

tentang Pemerintahan Daerah sekarang menjadi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sejak bulan Januari tahun 2001 yang sekarang menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004.

Dengan diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, maka terjadi perkembangan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Perubahan yang terjadi seperti dari sistem Sentralisasi menjadi sistem Akuntansi Singel Entry dan Cash Basis menjadi sistem Akuntansi Double Entry dan Acrual Basis.

Menurut (Mahmudi, 2007:3), Salah satu pilar utama tegaknya akuntabilitas suatu negara adalah adanya akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan. Para pemangku kekuasaan yang akuntabel adalah mereka yang terpercaya dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik yang dipercayakan kepadanya”

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah maka otonomi ini lebih mengacu kepada daerah kabupaten/kota berhubungan langsung dengan masyarakat. Pembangunan daerah tidak lepas dari pengelolaan pihak terkait, masing-masing daerah memiliki cara kerja yang berbeda dalam melakukan pengelolaan sehingga prestasi atau kinerjanya berbeda. Penilaian kinerja berasal dari penentuan secara periodik tentang aktivitas operasional suatu organisasi, bagian pemerintahan dan organisasi yang bersangkutan berdasarkan sasaran atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui kinerja keuangan yang diukur dengan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi masyarakat dapat menilai bagaimana kinerja pemerintah. Pemerintah daerah sebagai pihak yang

diberi wewenang menjalankan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya dalam bentuk laporan keuangan yang disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.1 tentang penyajian Laporan Keuangan.

Beberapa permasalahan keuangan yang dapat dianalisis di Kabupaten Langkat antara lain (1) terdapat penurunan realisasi anggaran pendapatan asli daerah yang menunjukandari tahun 2011 2012 2013 tidak efektifnya pencapaiankinerja pemerintah untuk mencapai target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah, (2) terdapat kenaikan realisasi belanja daerah dari tahun 2011 2012 2013 2014 2015 yang menunjukkan menurunnya efisiensi pemerintah dalam membiayai pemerintahnya.

Oleh sebab itu dari data diatas perlu dilakukanya ananlisis rasio keuangan daerah pada pemerintahan Kabupaten Langkat dengan menggunakan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi untuk mengukur sebagaimana permasalahan yang dihadapi pada pemerintahan Kabupaten Langkat pada suatu periode tertentu.

Analisis kinerja pengelolaan keuangan dan kemandirian daerah Kabupaten Langkat adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Kabupaten Langkat dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Langkat”.

Menurut Bastian Indra (2006:61), Pengukuran atau Penilaian Kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dilakukan untuk memenuhi hal-hal dalam membantu memperbaiki kinerja pemerintah sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian layanan, melakukan pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, dan mewujudkan pertanggung jawaban dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Tabel 1.1
Rasio Efektivitas PAD Pemerintahan Kabupaten Langkat

Tahun	Rasio Efektifitas	Kinerja
2011	82,94%	Tidak Efektif
2012	96,34%	Tidak Efektif
2013	88,62%	Tidak Efektif
2014	100,62%	Efektivitas Berimbang
2015	109,88%	Efektif

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Langkat (diolah) 2017

Dapat dilihat dari Tabel 1.1 Persentase Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Langkat pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami penurunan 3 tahun kebawah dinyatakan tidak efektif, efektif apabila mencapai minimal sebesar satu atau 100% (Abdul Halim, 2007:234).

Menurut tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2011, 2012, dan 2013 pemerintah daerah mengalami tidak efektifnya menggali kinerja pendapatan yang direalisasikan, pada tahun 2011 2012 dan 2013 tidak memperoleh nilai lebih dari 100%. Pemerintah daerah kabupaten langkat tidak menetapkan nilai standar rasio, secara tidak tertulis berdasarkan kinerja secara keuangan harus mencapai nilai diatas 100% yang dianggarkan, hal itu menunjukkan bahwa terlihat perbandingan dari tahun 2011 2012 2013 pemerintah daerah kabupaten langkat kurang mampu menjalankan tugas kinerja dengan target yang ditetapkan. Pemerintah daerah

dapat dikatakan mampu jika menjalankan tugas dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill (Abdul Halim,2007:234)

Penurunan Rasio Efektivitas diatas menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Langkat belum mampu melaksanakan otonomi daerah jika dilihat dari peningkatan pendapatan.

Pengukuran Efektivitas dilakukan dengan menggunakan hasil akhir dari suatu pelayanan dikaitkan dengan outputnya (*cost of outcome*). Semakin kontribusi output yang dihasilkan maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Tabel 1.2
Rasio Efisiensi PAD Pemerintahan Kabupaten Langkat

Tahun	Rasio Efisiensi	Kinerja
2011	95,96%	Kurang Efisien
2012	96,42%	Kurang Efisien
2013	98,77%	Kurang Efisien
2014	95,43%	Kurang Efisien
2015	90,02%	Kurang Efisien

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Langkat (dialah) 2017

Dilihat Tabel 1.2 Persentase Efisiensi PAD Kabupaten langkat pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 kurangefisien.Dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100% (Abdul Halim,2007:234).Hal ini menunjukkan biaya yang dikeluarkan pemerintah lebih kecil dari pada pendapatan yang direalisasikan. Pemerintah daerah dapat dikatakan mampu melaksanakan otonomi daerah jika mampu mengelola ataupun menggali sumber sumber keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahanya.(Nataludin, 2001:167)

Namun dari data tabel diatas juga menunjukkan pada tahun 2011, 2012, dan 2013 pemerintah daerah mengalami penurunan efisiensi, terutama pada tahun 2013 yang mengalami penurunan signifikan.

Pengukuran Efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antar output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan dengan semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Sebaliknya bila rasio efisiensi semakin tinggi menunjukkan bahwa besarnya biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pada input yang didapat.

Pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah terutama pelaksanaan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.(Abdul Halim, 2001: 261), pola instruktif merupakan peranan Pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Muhammad Taufik Hidayat (2017) dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Rasio Efisiensi Kabupaten Langkat sudah cukup efisien namun penurunan Rasio Efisiensi masih terjadi yang disebabkan oleh peningkatan pendapatan daerah yang diikuti oleh peningkatan belanja daerah. Berdasarkan hasil analisis data, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintahnya disebabkan oleh pemerintah daerah masih tergantung pada bantuan dana pihak eksternal (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) penyebab belum mandirinya kemandirian keuangan daerah pemerintah kabupaten langkat disebabkan oleh ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi pemerintah pusat yang tercermin dari besarnya bantuan pusat baik dari sudut anggaran rutin yaitu melalui subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pembangunan yaitu bantuan pembangunan daerah.

Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

relatif kecil dibandingkan Pendapatan Transfer, kurangnya usaha dan kemampuan pemerintah daerah mengelola dan menggali sumber pendapatan yang ada, Masih tingginya jumlah belanja rutin dari pada belanja modal daerah, Belum mandiriya pemerintah daerah dalam melakukan pembiayaan belanja pemerintahannya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Kinerja Keuangan Daerah. Adapun judul yang akan diangkat peneliti dalam penelitian ini adalah *“Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Langkat”*

B. Identifikasi Masalah

Setelah melakukan penelitian pendahuluan pada Pemerintah Kabupaten Langkat, maka identifikasi masalah yang ditemukan adalah:

1. Terdapat penurunan realisasi anggaran pendapatan asli daerah yang menunjukkan dari tahun 2011 2012 2013 tidak efektifnya pencapaian kinerja pemerintah untuk mencapai target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.
2. Terdapat kenaikan realisasi belanja daerah dari tahun 2011 2012 2013 2014 2015 yang menunjukkan menurunnya efisiensi pemerintah dalam membiayai pemerintahannya.

E. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Langkat mengalami penurunan?
2. Mengapa Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Langkat mengalami penurunan?
3. Bagaimana Meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah pemerintah Kabupaten Langkat jika dilihat dari Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi PAD?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya penurunan Rasio Efektivitas keuangan daerah pemerintah Kabupaten Langkat yang dilihat dari Rasio Efektivitas PAD.
- b. Untuk mengetahui penyebab terjadinya penurunan Rasio Efisiensi keuangan daerah Kabupaten Langkat yang dilihat dari Rasio Efisiensi PAD.
- c. Untuk mengetahui bagaimana meningkatkan kinerja keuangan daerah pemerintah Kabupaten Langkat jika dilihat dari Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi PAD.

1.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis tujuan peneliti ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat ditinjau dari teori Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi PAD.

b. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Daerah, peneliti ini diharapkan dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran Pemerintahan Daerah dalam menganalisis Kinerja Keuangan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada perkembangan zaman yang semakin aktif.

c. Bagi Peneliti, penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah dan pengaruh penerapan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah..

d. Bagi Peneliti Selanjutnya, semoga penelitian ini di dapat menjadi tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

C. URAIAN TEORI

1.1 Kinerja Keuangan Daerah

1.1.1 Pengertian Kinerja

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu, sedangkan menurut Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan, kinerja adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas yang terukur.

Kinerja adalah hasil yang dicapai dari yang telah dilakukan, dikerjakan seseorang dalam melaksanakan kerja atau tugas. Kinerja merupakan prestasi kerja atau performance, yaitu hasil kerja selama periode tertentu dibanding dengan berbagai kemungkinan.

Menurut Jumingan (2006: 239)

“Kinerja merupakan gambaran prestasi yang dicapai perusahaan dalam kegiatan operasionalnya baik menyangkut aspek keuangan, aspek pemasaran,

aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana, aspek teknologi, maupun aspek sumberdaya manusianya”.

Mardiasmo (2002) mendefinisikan “sistem pengukuran kinerja publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer public menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur financial dan non financial. Adapun indikator kinerja seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2002) bahwa sekurang – kurangnya ada 4 tolak ukur penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu :

1. Penyimpangan antara realisasi anggaran dengan yang ditargetkan yang ditetapkan dalam APBD
2. Efisiensi biaya
3. Efektivitas program
4. Pemerataan dan keadilan

1.1.2 Pengertian Keuangan Daerah

Menurut Abdul Halim (2008: 18-19) keuangan daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dikuasai atau dimiliki negara atau daerah yang lebih tinggi atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Abdul Halim (2008: 25) menyatakan keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan barang-barang inventaris milik

daerah. Di lain pihak, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Keuangan daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara. Keuangan daerah berperan penting dalam otonomi daerah karena dari keuangan menggambarkan cerminan kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan azas otonomi.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menetapkan Asas umum pengelolaan keuangan daerah sesuai isi pasal 4 yaitu :

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-perundangan, efisiensi, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

1.1.3 Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja Keuangan pemerintah daerah mendefinisikan sebagai berikut :

“Kinerja keuangan pemerintah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran”.

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai apa yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus begitu juga sebaliknya apabila pencapaian tidak mencapai apa yang direncanakan maka dapat dikatakan kinerja belum maksimal.

Menurut Anthon Simbolon (2006) Kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Abdul Halim, 2008: 230)

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta (Abdul Halim, 2008: 231-232)

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemda. Menurut Mohammad Mahsun (2012:196) indikator Kinerja Keuangan Daerah meliputi:

1. Indikator Masukan (Inputs), misalnya:
 - a. Jumlah dana yang dibutuhkan
 - b. Jumlah pegawai yang dibutuhkan
 - c. Jumlah infrastruktur yang ada
 - d. Jumlah waktu yang digunakan
2. Indikator Proses (Proces), misalnya :
 - a. Ketaatan pada peraturan perundangan
 - b. Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa
3. Indikator Keluaran (Output), misalnya :
 - a. Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan
 - b. Ketetapan dalam memproduksi barang atau jasa
4. Indikator Hasil (Outcome), misalnya :
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat
 - b. Produktivitas para karyawan atau pegawai
5. Indikator Manfaat (Benefit), misalnya :
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat
 - b. Tingkat partisipasi masyarakat
6. Indikator Impact, misalnya :
 - a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat

1.1.4 Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Mohammad Mahsun (2012; 135), Analisa Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan.

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004), Rasio Keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dari signifikan (berarti). Misalnya antara utang dan modal, kas dan total aktiva, harga pokok penjualan dan penjualan, dan sebagainya.

Selain itu Sofyan Syafri Harahap (2004) juga menyatakan bahwa, Analisis Rasio Keuangan Daerah adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia.

Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilakukan meskipun pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta (Abdul Halim 2007).

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerah relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi

rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah lainnya (Abdul Halim 2007)

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD (Abdul Halim, 2007: 232) adalah :

1. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
2. Pemerintah pusat/provinsi sebagai masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
3. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham daerah, bersedia member pinjaman maupun membeli obligasi.

Dengan demikian beberapa cara yang dilakukan peneliti dalam mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya dengan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bias digunakan adalah : Rasio Efektivitas Keuangan Daerah dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.

1.2 Pengukuran Kinerja Pemerintah

1.2.1 Definisi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk: efisiensi penggunaan sumber daya alam yang menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (sebaik berapa barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan) hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Robertson (2002)).

Menurut Anthon Simbolon (2003)

“Pengkuran Kinerja adalah Proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah”. Proses ini dimaksudkan untuk menilai setiap pencapaian indikator tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategi.

Pengkuran kinerja dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan efektivitas dalam pemberian pelayanan public. Kedua, ukuran kinerja digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban public dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

1.2.2 Elemen Pokok Pengukuran Kinerja

Menurut Mohammad Mahsun (2006: 146-149) elemen pokok suatu pengukuran kinerja antara lain :

1. Menetapkan Tujuan, Sasaran dan Strategi Organisasi
2. Merumuskan Indikator dan Ukuran Kinerja
3. Mengatur Tingkat Ketercapaian Tujuan dan Sasaran-sasaran Organisasi
4. Evaluasi Kinerja

1. *Feedback*
2. Penilaian Kemajuan Kinerja
3. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas

1.2.3 Tujuan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja pemerintah bertujuan untuk menilai sejauh mana mereka mampu menyediakan produk (jasa) yang berkualitas dengan biaya yang layak. Bagi organisasi pemerintah, kinerja pelayanan public merupakan salah satu keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah (Dwiyanto, 2003).

Oleh sebab itu dibawah ini merupakan tujuan Pengukuran Kinerja Menurut Mardiasmo (2002: 121), Tujuan Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk memenuhi tiga maksud yaitu :

1. Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah.
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban public dan memperbaiki komunikasi kelembagaan

1.2.4 Manfaat Pengukuran Kinerja

Menurut Ihlalul Ulum (2004; 277), Penilaian kinerja mempunyai manfaat bagi organisasi, yaitu :

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja menejemen.
2. Menunjukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Membantu mengungkapkan dan memecahkan masalah yang ada.
4. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
5. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

1.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1.3.1 Definisi Laporan Keuangan

Laporan keuangan disektor pemerintahan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik.

Laporan keuangan merupakan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

1.3.2 Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan (financial statement) pemerintah terdiri dari dua jenis : (1) laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), dan (2) laporan financial (financial reports). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Hal ini sesuai karakteristik organisasi pemerintahan sebagai pelaksana anggaran. Berikut adalah klasifikasi laporan keuangan pemerintah daerah :

1. Laporan Pelaksanaan Anggaran :
 - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - Laporan Perubahan SAL (LPSAL)
2. Laporan Finansial :
 - Neraca
 - Laporan Operasional

- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- Laporan Arus Kas (LAK)
- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. LRA menjadi salah satu laporan pertanggung jawaban keuangan daerah yang utama, karena anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya public, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Laporan Realisasi Anggaran menduduki prioritas yang lebih penting dan merupakan jenis laporan keuangan daerah yang paling dahulu dihasilkan sebelum kemudian disyaratkan untuk membuat laporan arus kas.

Menurut Permendagri No. 4 Tahun 2008 Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut : Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu.

1.3.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah UU No 33 Tahun 2004. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

1.3.4 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dari pengertian Pendapatan Asli daerah di atas, penjelasan masing-masing sumber pendapatan asli daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18 menyebutkan Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Sebagai tambahan pengertian PAD menurut para ahli dua pendapat yakni menurut Abdul Halim (2007:96) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sedangkan berdasarkan pendapat yang dikemukakan Mardiasmo (2002:132) “PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dari berbagai pendapat mengenai PAD diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang sumbernya berasal dari daerah itu sendiri berupa dana yang pemerolehannya dikelola oleh pemerintah daerah beserta jajarannya dan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

1.4 Rasio Efektivitas PAD

Analisis tingkat efektif keuangan tingkat daerah dapat dihitung dengan menggunakan rasio efektivitas, yaitu rasio yang menggunakan perbandingan dari lima tahun antara yang direalisasikan dari tahun 2011, 2012, 2013 kinerja yang direncanakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah kurang efektif. Menurut Mohammad Mahsun (2009) Efektivitas yang dimaksud kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio Efektivitas keuangan daerah dapat diukur dengan cara sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100 \%$$

Kriteria Rasio Efektivitas menurut Mohammad Mahsun (2009), adalah :

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif

1.5 Rasio Efisiensi PAD

Rasio Efisiensi PAD menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi berarti Kinerja Keuangan Daerah semakin baik.

Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimahnya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah berhasil merealisasikan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterimahnya (Abdul Halim 2007 : 234). Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.1
Persentase Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
100% keatas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Abdul Halim (2007 : 234)

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Taufik Hidayat (2017)	Analisis Rasio Efisiensi dan Kemandirian Keuangan	Rasio Efisiensi Kabupaten Langkat sudah cukup efisien namun penurunan Rasio Efisiensi masih terjadi yang disebabkan oleh peningkatan

		Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Langkat.	pendapatan daerah yang diikuti oleh peningkatan belanja daerah. Berdasarkan hasil analisis data, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintahnya disebabkan oleh pemerintah daerah masih tergantung pada bantuan dana pihak eksternal (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) penyebab belum mandirinya kemandirian keuangan daerah pemerintah kabupaten langkat disebabkan oleh ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi pemerintah pusat yang tercermin dari besarnya bantuan pusat baik dari sudut anggaran rutin yaitu melalui subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pembangunan yaitu bantuan pembangunan daerah, Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibandingkan Pendapatan Transfer, kurangnya usaha dan kemampuan pemerintah daerah mengelola dan menggali sumber pendapatan yang ada, Masih tingginya jumlah belanja rutin dari pada belanja modal daerah, Belum mandirinya pemerintah daerah dalam melakukan pembiayaan belanja pemerintahannya.
2	Fitriyah Agustin (2007)	Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar).	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa berdasarkan Rasio Keuangan APBD maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah baik jika dilihat dari Rasio DSCR. Namun dikatakan kurang baik apabila dilihat dari Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi PAD. Pemerintah daerah belum bisa menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien karena masih banyak rasio-rasio yang menunjukkan kurangnya kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mengelola sumber dana yang dimilikinya.

3	Bahrun Assidiqi (2014)	Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012.	Hasil penelitian ini adalah menunjuka Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten tahun 2008-2012 secara umum dapat dikatakan baik, meskipun tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin tinggi dan pemungutan pajak daerah masih belum efisien. Hasil Kinerja Keuangan Belanja Daerah secara umum dapat dikatakan baik, tetapi dalam keserasian belanja belum terjadi keseimbangan antara Belanja Oprasi dengan Belanja Modal.
4	Anindyati Suhartini S.Motto (2010)	Analisis Kinerja Keuangan APBD pada pemerintah Daerah Kota Gorontalo.	Hasil penelitian ini menunjukkan Kinerja Keuangan Pemerintah dinilai tidak efektif atau belum baik karena hanya rasio efisiensi saja yang memenuhi standar keuangan sedangkan rasio lainnya sebagian besar masih pada kriteria tidak efektif.

B. Kerangka Berpikir

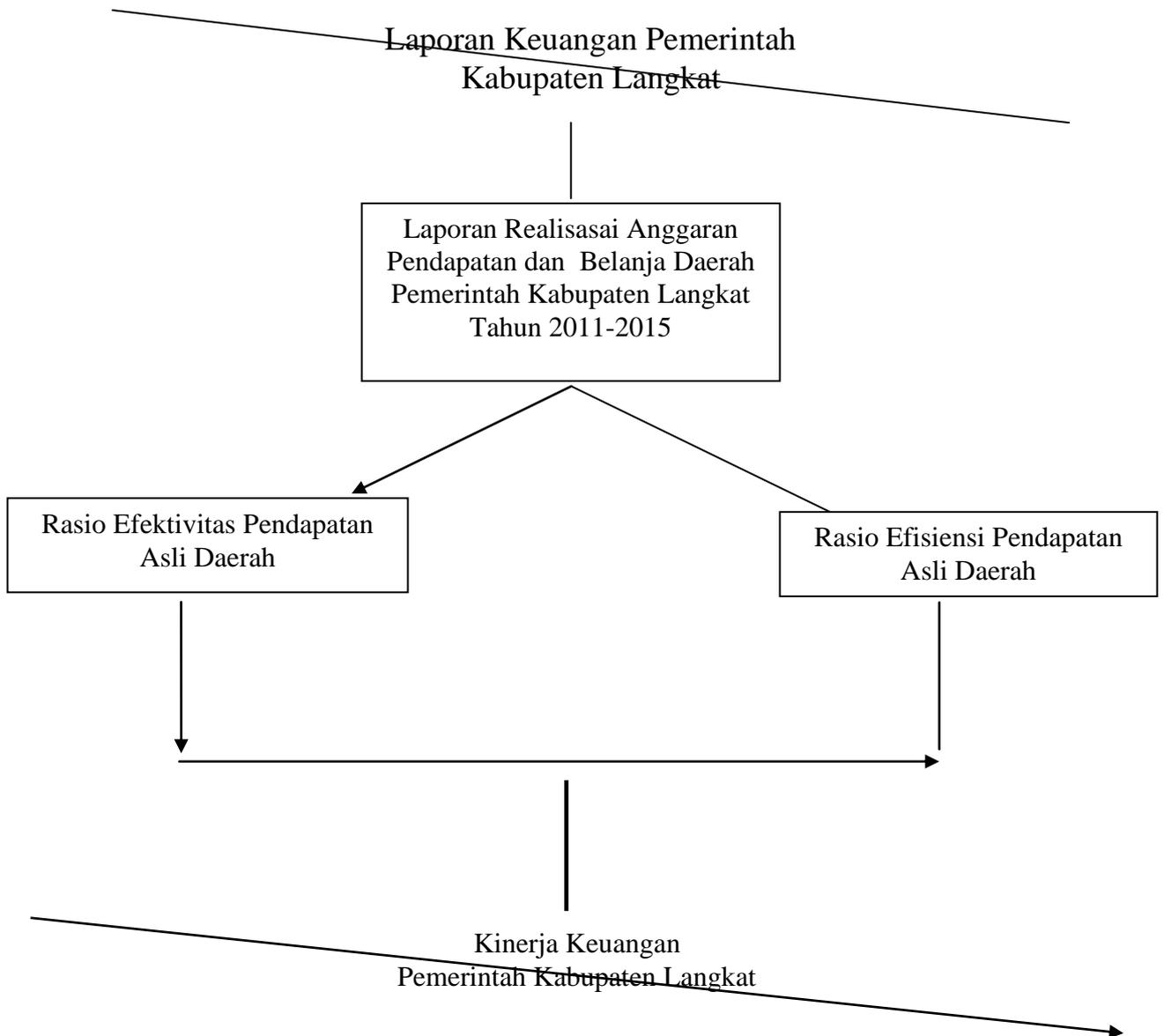
Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program dan kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Indikator kinerja merupakan ukuran kualitas yang telah ditetapkan dengan memperhatikan indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja keuangan suatu daerah.

Menganalisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Langkat adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Kabupaten Langkat dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu.

Untuk mengetahui bagaimanakah kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Langkat yaitu melakukan analisis laporan keuangan dengan menggunakan analisis keuangan terhadap APBD. Dengan menggunakan rasio efektivitas dan rasio efisiensi tersebut dapat diketahui Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Langkat. Jika semua rasio diatas menunjukkan hasil angka yang sesuai target, maka Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat dapat dikatakan baik.

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan membandingkan dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Oleh sebab itu disini peneliti hanya menitik beratkan penilaian kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Langkat tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dengan menggunakan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah dan Rasio Efisiensi Daerah. Berikut dapat dijelaskan kerangka berpikir dalam penelitian ini seperti pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif. Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2007, hal.11). Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

B. Definisi Oprasional Variabel

Definisi operasional adalah suatu usaha untuk melakukan pendekatan sejauh mana variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan 2 rasio ini yaitu :

1.1 Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100 \%$$

D. Jenis dan Sumber Data

1.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini termasuk data kuantitatif. Yaitu data yang berbentuk angka-angka dan dapat dihitung seperti laporan keuangan (Sugiyono, 2010 Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Bandung: Alfabeta).

1.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau dokumenter baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan (Sugiyono 2012, hal 129) sumber data dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat dimulai dari tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu:

- Studi dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan cara memperoleh data dari kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat serta melihat dan mempelajari hal-hal yang berupa catatan maupun penggunaan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang sudah ada serta mencatat data tertulis yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap dat keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan topik penelitian.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam analisis deskriptif ini adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penelitian berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.
2. Menghitung rasio-rasio kinerja keuangan APBD pada Laporan Realisasi APBD Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.
3. Membandingkan rasio kinerja keuangan APBD 5 tahun terakhir.
4. Menginterpretasikan terhadap kriteria maupun pola hubungan rasio kinerja keuangan APBD.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Langkat

Kabupaten Langkat merupakan sebuah kabupaten yang berada di provinsi Sumatera Utara yang beribu kota Stabat. Dan berdasarkan Perda No 11 tahun 1995 telah ditetapkan Hari Jadi Kabupaten Langkat 17 Januari 1750, dengan Motto : “ Bersatu Sekata Berpadu Berjaya”.

Kabupaten Langkat memiliki jarak rata-ratanya dari Kota Medan sekitar 60 km ke arah barat laut, dan berbatasan langsung dengan Provinsi Nangroe Aceh Darrussalam. Kabupaten Langkat beribu kota di Stabat. Wilayah Kabupaten Langkat terdiri dari 23 kecamatan yang tersebar di dalam 3 wilayah yaitu Wilayah I Langkat Hulu, Wilayah II Langkat Hilir dan Wilayah III Teluk Haru.

Tabel 4.1
Rincian Wilayah Pemerintah Kabupaten Langkat

No	Kecamatan	Luas wilayah Km ²	Desa/ Kelurahan	Jarak Km
1	Bahorok	884,79	19	73
2	Serapit	122,95	10	60
3	Salapian	187,96	17	55
4	Kutambaru	244,11	8	65
5	Sei Bingai	338,45	16	45
6	Kuala	179,95	16	40
7	Selesai	152,08	14	30
8	Binjai	49,55	7	23
9	Stabat	90,64	12	-
10	Wampu	193,75	14	5
11	Batang Serangan	934,90	8	31
12	Sawit Seberang	435,07	7	28
13	Padang Tualang	274,91	12	36

14	Hinai	114,28	13	14
15	Secanggang	248,73	17	23
16	Tanjung Pura	165,78	19	18
17	Gebang	162,99	11	32
18	Babalan	101,80	8	40
19	Sei Lapan	306,81	14	40
20	Brandan Barat	92,00	7	45
21	Besitang	597,48	9	61
22	Pangkalan Susu	219,21	11	63
23	Pematang Jaya	165,10	8	75
	Kabupaten Langkat	6.263,29	277	-

2. Visi dan Misi BPKAD Kabupaten Langkat

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat merupakan lembaga yang mengelola keuangan dan aset daerah pada pemerintahan Kabupaten Langkat, berikut merupakan visi dan misi BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat diantaranya sebagai berikut :

1. Visi BPKAD Kabupaten Langkat

Adapun Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dirumuskan dan ditetapkan sebagai berikut : “ Terwujudnya Sistem Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat Berbasis Teknologi Informasi”.

a. Terwujudnya

Mengandung pengertian tercapainya suatu keadaan atau kondisi yang diharapkan atau diinginkan dimasa depan.

b. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatasahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan dan barang daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah dalam bentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

c. Berkualitas

Artinya pengelolaan keuangan harus bersifat akuntabel dalam artian dapat dipertanggungjawabkan secara integritas, jujur dan taat terhadap peraturan perundang-undangan, dikelola secara profesional dengan mengedepankan efisiensi dan efektifitas yang di dukung oleh sistem administrasi yang tertib berdasarkan tata cara dan prosedur yang benar.

d. Berbasis Teknologi Informasi

Bahwa pengelolaan keuangan dibangun atas dasar pengembangan teknologi dan kebebasan arus informasi dimana segala proses yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan secara komputerisasi dan aksesnya dapat secara langsung dilihat dan diterima oleh mereka yang membutuhkan.

2. Misi BPKAD Kabupaten Langkat

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat menetapkan misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan sinergitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. Meningkatkan sistem pengendalian intern dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- c. Membangun sarana dan prasarana serta pengembangan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya pengelolaan keuangan dan aset daerah.

3. Deskripsi Data

a. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Hasil dari perhitungan Rasio Efektivitas PAD dapat dilihat pada tabel 4.2. dibawah ini :

Tabel 4.2
Perhitungan Rasio Efektivitas PAD
Pemerintah Kabupaten Langkat

Tahun Anggaran	Anggaran PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	REPAD (1)x(2)/100%
2011	41,643,817,919,00	34,540,642,904,35	82,94%
2012	134,144,946,610,00	129,242,580,780,08	96,34%
2013	73,930,081,932,00	65,521,499,189,41	88,62%
2014	107,142,284,356,00	107,811,975,547,21	100,62%
2015	111,750,322,000,00	122,715,359,909,79	109,88%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Langkat (diolah) 2017

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Langkat yang telah diketahui bahwa Efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten Langkat pada tahun 2011, 2012, 2013 tidak efektif, karena nilai yang diperoleh masih dibawah 100% yaitu 2011 sebesar 82,94%, 2012 sebesar 96,35%, 2013 sebesar 88,63%. Untuk tahun 2014, 2015 sudah efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100% yaitu 2014 sebesar 100,62% dan 2015 sebesar 109,88%.

b. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi merupakan rasio yang menunjukkan seberapa efisiensinya pendapatan/input yang telah diperoleh pemerintah daerah untuk membiayai

kegiatan pemerintahnya. Rasio efisiensi membandingkan Input yang di dapat pemerintah daerah terhadap Output yang dikeluarkan.

Tabel 4.3
Perhitungan Rasio Efisiensi PAD
Pemerintah Kabupaten Langkat

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	REPAD (1)x(2)/100%
2011	1.063.869.134.063,82	1.108.552.889.780,35	95,96%
2012	1.329.229.102.729,52	1.378.567.032.459,08	96,42%
2013	1.536.811.928.028,03	1.555.901.880.204,41	98,77%
2014	1.605.301.211.464,57	1.682.148.382.104,21	95,43%
2015	1.819.224.899.770,10	2.020.688.705.016,79	90,02%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Langkat (dialah)2017

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Langkat yang telah diketahui antara perbandingan pendapatan daerah dan belanja daerah dapat dikatakan cukup efisien. Rasio efisiensi pemerintah daerah Kabupaten Langkat pada tahun 2011 memiliki arti bahwasannya besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah kabupaten Langkat dalam memperoleh pendapatan yang diterima sebesar 95,96%, kemudian Rasio Efisiensi pemerintah daerah Kabupaten Langkat pada tahun 2012 besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Langkat dalam memperoleh pendapatan yang diterima sebesar 96,42% dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan biaya yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Langkat dalam memperoleh pendapatan yang diterima sebesar 98,77%, tahun 2014 efisiensi besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Langkat dalam memperoleh pendapatan yang diterima sebesar 95,43% dan tahun 2015 biaya yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Langkat dalam memperoleh pendapatan yang diterima sebesar 90,02%. Dari data di atas dapat disimpulkan efisiensi keuangan daerah cukup efisien dikarenakan angka efisiensi dibawah

100%. Meskipun demikian biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat untuk memperoleh pendapatannya masih cukup besar.

Namun pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 efisiensi mengalami penurunan sebesar 0,46% pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 sebesar 2,35%. Hal ini menunjukkan belanja pemerintah Kabupaten Langkat pada tahun 2011 sampa tahun 2013 lebih besar dari tahun ke tahun dan pemerintah belum menekan upaya peningkatan belanja daerah.

B. Pembahasan

1. Penyebab Penurunan Efektivitas

Penurunan efektivitas pemerintah Kabupaten Langkat pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dikarenakan pendapatan daerah masih dibawah dari yang dianggarkan sebelumnya. Hal ini disebabkan karena sumber penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah sangat kurang dari yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah dikatakan mampu atau efektif apabila mencapai minimal sebesar satu atau 100% (Abdul Halim,2007:234).

Efektivitas yang dimaksud kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah Mohammad Mahsun (2009). Solusi untuk Pemerintah Kabupaten Langkat seharusnya lebih mampu meningkatkan dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah, kinerja pemerintah daerah menjadi lebih baik diharapkan indikator dampak yang meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pendapatan masyarakat lebih ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat.

Hasil penelitian ini juga relevan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Taufik Hidayat (2017) yang menyimpulkan bahwa Rasio Efisiensi cukup efisien dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dan Rasio Kemandirian keuangan daerah pemerintah Kabupaten Langkat menunjukkan pola hubungan instruktif (belum mandiri).

Hasil penelitian ini juga relevan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitriyah Agustin (2007) yang menyimpulkan bahwa Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Kemandirian keuangan daerah pemerintah Kabupaten Blitar menunjukkan pemerintah daerah belum bisa menjalankan tugasnya karena kurangnya kinerja pemerintah Kabupaten Blitar dalam mengelola sumber dana yang dimilikinya. Hasil penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Anindyati Suhartini S.Motto (2010) yang menyimpulkan bahwa pemerintah Daerah Kota Gorontalo menunjukkan kinerja keuangan pemerintah dinilai tidak efektif atau belum baik karena hanya Rasio Efisiensi saja yang memenuhi standar keuangan.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bahrin Assidiqi (2014) menyimpulkan bahwa kinerja Kabupaten Klaten tahun 2008-2012 secara umum dapat dikatakan baik, meskipun tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin tinggi dan pemungutan pajak daerah belum efisien.

2. Penyebab Penurunan Efisiensi

Penurunan Efisiensi pemerintah Kabupaten Langkat pada tahun 2011 sampai dengan 2013 dikarenakan belanja pemerintah daerah dari tahun 2011 sampai dengan 2013 selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun dan total belanja daerah tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 tidak berbeda terlalu jauh,

dari pada tahun pada tahun 2014 dan tahun 2015 dimana total pendapatan sedikit lebih besar dibandingkan dengan total belanja daerah. Oleh sebab itu faktor penurunan efisiensi pemerintah daerah Kabupaten Langkat diantaranya sebagai berikut :

1. Belanja daerah yang meningkat.
2. Belanja pemerintah daerah berselisih tidak terlalu jauh dari pendapatan pemerintah daerah.

Hal ini sejalan dengan pendapat (Nataludin, 2001 : 167). Pemerintah daerah dapat dikatakan mampu melaksanakan otonomi daerah jika mampu mengelola ataupun menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggara pemerintahannya.

Hal ini juga menunjukkan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 pemerintah Kabupaten Langkat belum memaksimalkan pendapatan asli daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahannya. Berdasarkan pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwasannya pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 pemerintah Kabupaten Langkat belum memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) yang dilihat dari naiknya belanja daerah setiap tahunnya.

Solusi untuk pembiayaan pemerintah Kabupaten Langkat sebaiknya memprioritaskan meningkatkan belanja modal dari pada belanja operasi agar nantinya pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Langkat lebih efisien.

Hasil penelitian ini juga relevan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Taufik Hidayat (2017) yang menyimpulkan bahwa Rasio Efisiensi cukup efisien dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dan

Rasio Kemandirian keuangan daerah pemerintah Kabupaten Langkat menunjukkan pola hubungan instruktif (belum mandiri).

Hasil penelitian ini juga relevan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitriyah Agustin (2007) yang menyimpulkan bahwa Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Kemandirian keuangan daerah pemerintah Kabupaten Blitar menunjukkan pemerintah daerah belum bisa menjalankan tugasnya karena kurangnya kinerja pemerintah Kabupaten Blitar dalam mengelola sumber dana yang dimilikinya. Hasil penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Anindyati Suhartini S.Motto (2010) yang menyimpulkan bahwa pemerintah Daerah Kota Gorontalo menunjukkan kinerja keuangan pemerintah dinilai tidak efektif atau belum baik karena hanya Rasio Efisiensi saja yang memenuhi standar keuangan.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bahrin Assidiqi (2014) menyimpulkan bahwa kinerja Kabupaten Klaten tahun 2008-2012 secara umum dapat dikatakan baik, meskipun tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin tinggi dan pemungutan pajak daerah belum efisien.

3. Meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat

Dari hasil perhitungan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi PAD yang telah peneliti jabarkan dapat diketahui bagaimana meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten langkat.

Meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah jika dilihat dari Rasio Efektivitas pendapatan harus dinaikan. Kemudian peningkatan pendapatan diikuti juga dengan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah agar pendapatan melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya.

Meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah jika dilihat dari Rasio Efisiensi menunjukkan kinerja pemerintah daerah kabupaten langkat sebenarnya sudah efisien apabila biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterimahnya. Namun masih adanya penurunan efisiensi yang disebabkan oleh peningkatan belanja daerah dari tahun ke tahun. Kemudian peningkatan pendapatan daerah diikuti juga peningkatan belanja daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan peneliti dengan menggunakan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah untuk menilai kinerja keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Langkat didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas PAD pada pemerintah Kabupaten Langkat diketahui bahwa efektivitas keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat tahun 2011, 2012, 2013 berjalan Tidak Efektif karena efektivitasnya masih dibawah 100% yaitu sebesar 82,94%, 96,34%, 88,62%. Tahun 2014 dan 2015 sudah Efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100% yaitu sebesar 100,62% dan 109,88%.

2. Penurunan Efektivitas PAD pemerintah Kabupaten Langkat pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 disebabkan karena pendapatan daerah masih dibawah dari yang dianggarkan sebelumnya.

3. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi pada pemerintah kabupaten Langkat kurang efisien dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Tahun 2011 rasio efisiensi sebesar 95,96%, tahun 2012 96,42%, tahun 2013 98,77%, tahun 2014 95,43% dan tahun 2015 sebesar 90,02%. Akan tetapi penurunan efisiensi terjadi dari tahun 2011

sampai dengan tahun 2013 hal ini mengakibatkan belanja pemerintah selalu meningkat dari tahun ke tahun.

4. Penurunan Efisiensi Pemerintah daerah Kabupaten Langkat pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 disebabkan belanja pemerintah daerah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, total belanja daerah tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 tidak berbeda terlalu jauh. Sedangkan pada tahun 2014 dan tahun 2015 total realisasi belanja dengan total realisasi pendapatan daerah sedikit lebih tinggi dari pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pemerintah Kabupaten Langkat Seharusnya lebih mampu meningkatkan dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga potensi yang dimiliki Kabupaten Langkat mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat sekitar yang berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dengan meningkatkan dan memaksimalkan potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Langkat juga akan lebih efektif sedikit demi sedikit terhadap ketergantungan pemerintah pusat.

Untuk pembiayaan pemerintah Kabupaten Langkat sebaiknya memprioritaskan meningkatkan belanja modal dari pada belanja operasi agar nantinya pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Langkat lebih efisien.

Kemudian bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak lagi dalam menganalisa kinerja keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Abdul Halim (2012). *Akuntansi Sektor Publik : Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*.
- Abdul Halim (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Abdul Halim (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Abdul Halim (2001). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Abdul Halim (2008). *Auditing (Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan)* (edisi keempat). Yogyakarta: Unit Penelitian dan Percetakan STIM YKPN.
- Anindyati Suhartini S. Motto (2012). “Analisis Kinerja Keuangan APBD pada Pemerintah Daerah Kota Gorontalo”. *Skripsi Akuntansi*.
- Bastian Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.
- Bahrin Assidiqi (2014). “Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012”. *Skripsi Akuntansi*.
- Fitriyah Agustin (2007). “Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar)”. *Skripsi Akuntansi*.
- Hony Adhiantoko (2013).”Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007-2011)”. *Skripsi Akuntansi*.
- Ihyaul Ulum, MD (2004). *Akuntansi Sektor Publik* (sebuah pengantar). Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Jumingan. (2006). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta.
- Mahmudi (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Mardiasmo (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Mahsun, Mohammad (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Muhammad Taufik Hidayat (2017). Analisis Rasio Efisiensi dan Kemandirian Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Langkat. *Skripsi Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Maret 2017
- Nataludin (2001). *Potensi dana perimbangan daerah pada pemerintah daerah di Propinsi Jambi, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Penyajian Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 01. *Penyajian Laporan Keuangan*.
- Permendagri Nomor 4 Tahun 2008. *Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Pemerintah PP Nomor 71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintahan PP Nomor 108 Tahun 2000. *Tentang Pedoman Organisasi Daerah*.
- Peraturan Pemerintah PP Nomor 58 Tahun 2005. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah : Pasal 4*.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: Pasal 1 No.37 Pasal 4 No. 5*.
- Robertson (2002). *Perwujudan Akuntabilitas Instansi Pemerintah*, Edisi Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Simbolon, Anthon (2003). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: Webmaster-Dispenad.
- Simbolon, Anthon (2006). *Akuntabilitas Birokrasi Publik* (edisi revisi). Yogyakarta: UGM
- Sugiyono, (2007,2010,2012). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*.